

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.1.1 Keadaan Geografis dan Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan suatu Provinsi yang terletak di Ujung Timur Negara Indonesia. Secara astronomis Provinsi Nusa Tenggara Timur terletak antara 80 – 120 Lintang Selatan dan 1180 - 1250 Bujur Timur.

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTT memiliki batas-batas:

1. Utara – Laut Flores,
2. Selatan – Samudera Hindia,
3. Timur – Negara Timor Leste,
4. Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores.

Provinsi NTT terdiri dari 21 Kabupaten dan 1 Kota yang terletak ditujuh Pulau besar, yaitu :

1. Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah.
2. Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang.
3. Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur.
4. Pulau Alor: Alor

5. Pulau Lembata: Lembata

6. Pulau Rote: Rote Ndao.

Luas wilayah daratan 47.931, 54 km² tersebar pada 1.192 pulau (43 pulau dihuni dan 1.149 pulau tidak dihuni). Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25-118 km.

Seperti halnya ditempat lain di Indonesia, di Nusa Tenggara Timur hanya dikenal musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada bulan Juni-September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Desember-Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada April- Mei dan Oktober-November. Walaupun demikian mengingat NTT dekat dengan Australia, arus angin yang banyak mengandung uap air dari Asia dan Samudera Pasifik sampai di wilayah NTT kandungan uap airnya sudah berkurang yang mengakibatkan hari hujan di NTT lebih sedikit dibanding wilayah yang dekat dengan Asia. Hal ini menjadikan NTT sebagai wilayah yang tergolong kering dimana hanya 4 bulan (Januari s.d Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan relatif kering.

NTT terkenal dengan sebutan Flobamora yang merupakan kumulan lima pulau besar di NTT (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 km² dengan pulau Timor sebagai pulau

terluas (14.200 km²). Wilayah administrasi di NTT tahun 2017 terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota. Wilayah terluas adalah kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 km² (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96%).

Karena merupakan provinsi kepulauan, akses menuju ibu kota provinsi NTT, Kupang, ditempuh dengan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi dan klimatologi di NTT, tercatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2017 adalah 32,320C dan terendah adalah 15,550C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 27-280C dengan pengecualian wilayah Manggarai yang memiliki rata-rata suhu 20,130C.

Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi di NTT tahun 2017 adalah antara 900-4.400 mm³. Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan terbanyak 218 disusul Manggarai Timur dengan 166 hari hujan dan Ngada dengan 158 hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Kabupaten Nagekeo dengan 55 hari hujan disusul Timor Tengah Utara dengan 60 hari hujan dan Kabupaten Kupang dengan 70 hari hujan pada tahun 2017.

4.1.2 Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penduduk Nusa Tenggara Timur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rata-rata Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 adalah sebanyak 5.287.302 jiwa yang terdiri atas 2.619.181 laki-laki dan 2.668.121 perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2017 adalah 98 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 98 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 adalah 1,61 persen. Kepadatan penduduk sebanyak 110 jiwa per km², dimana yang terdapat adalah Kota Kupang dengan 2.289 jiwa per km² dan Sumba Tengah dengan 39 jiwa per km². Sementara itu, jumlah rumah tangga pada adalah 1,1 juta rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,6.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi NTT Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sumba Barat	64,918	60,858	125,776
2	Sumba Timur	129,389	123,315	252,704
3	Kupang	190,480	182,297	372,777
4	Timor Tengah Selatan	228,917	235,063	463,980
5	Timor Tengah Utara	123,384	126,327	249,711
6	Belu	106,782	106,814	213,596
7	Alor	98,916	103,974	202,890
8	Lembata	64,581	73,133	137,714
9	Flores Timur	120,285	131,326	151,611
10	Sikka	150,023	167,269	317,292
11	Ende	128,819	143,265	272,084
12	Ngada	77,701	81,380	159,081
13	Manggarai	161,192	468,006	329,198
14	Rote Ndao	81,380	78,407	159,614
15	Manggarai Barat	130,199	133,008	263,207
16	Sumba Tengah	36,385	34,334	70,719
17	Sumba Barat Daya	170,293	161,601	331,894
18	Nagekeo	69,291	73,513	142,804
19	Manggarai Timur	138,380	141,738	280,118
20	Sabu Raijua	46,814	44,698	91,512
21	Malaka	90,121	96,191	186,312
22	Kota Kupang	211,104	201,604	412,708
23	Nusa Tenggara Timur	2,619,181	2,668,121	5,287,302

Sumber Data : BPS Provinsi NTT, diolah 2018

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat Kota Kupang mempunyai jumlah penduduk tertinggi untuk seluruh Kabupaten Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah laki-laki sebanyak 211,104 jiwa, jumlah perempuan sebanyak 201,604 dan jumlah seluruh penduduk Kota Kupang adalah 412,708. Kabupaten Sumba Tengah mempunyai jumlah penduduk terendah untuk seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah laki-laki sebanyak 36,385 jiwa, perempuan sebanyak 34,334 jiwa dan total seluruh penduduk Kabupaten

Sumba Tengah 70,719 jiwa. Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2,619,181 jiwa dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 2,668,121 jiwa dan total keseluruhan laki-laki dan perempuan sebanyak 5,287,302.

Berdasarkan hasil Sakernas 2017, angkatan kerja tahun 2017 berjumlah 2.398.609 orang atau 69,09 persen terhadap penduduk usia kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96,73 persen berstatus kerja. Tingkat pengangguran tercatat 3,27. Di NTT, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian diikuti oleh sektor jasa dan perdagangan sebanyak 584.090 penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja berstatus pekerja tidak dibayar (pekerja keluarga). Jumlah pencari kerja terdaftar pada tahun 2017 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 3.797 orang yang terdiri atas 1.775 laki-laki dan 2.022 perempuan. Sebanyak 1.614 orang yang terdaftar sudah ditempatkan bekerja.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, Tahun 2017

No	Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatn Kerja	1,357,673	1,040,936	2,398,609
	-Bekerja	1,311,351	1,008,710	2,320,061
	-Pengangguran	46,322	32,226	78,548
2	Bukan Angkatan Kerja	339,464	733,783	1,073.247
	-Sekolah	187,589	189,656	377,245
	-Mengurus Rumah Tangga	73,736	488,808	562,544
	-lainnya	78,139	55,319	133,458
	TOTAL	1,697,137	1,774,719	3,471,856
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kerja		80,00	58,65	69,09
Tingkat Pengangguran		3,41	3,10	3,27

Sumber data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang, Diolah 2018

Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sebanyak 2,398,609 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 1,357,637 jiwa perempuan 1,040,936 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2,320,061 jiwa dan yang belum mendapatkan pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan sebanyak 78,548.

Jumlah bukan angkatan kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sebesar 1,073,247 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 339,464 jiwa dan perempuan sebanyak 733,783 jiwa dengan rincian yang bersekolah sebanyak 737,245 jiwa jiwa dan perempuan sebanyak 73,736 jiwa dan perempuan sebanyak 488,808 jiwa dan lainnya sebesar 133,458 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 78,139 dan perempuan sebanyak 55,519.

4.1.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic Needs Approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai

pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Tahun 2017, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 21,38 persen atau sebanyak 1,13 juta orang dengan garis kemiskinan sebesar Rp. 343.396 perkapita perbulan. NTT menduduki peringkat ke 33 nasional dengan nilai IPM 63,13. Nilai IPM tertinggi menurut Kabupaten Kota di NTT adalah Kota Kupang pada peringkat 1, Ngada peringkat 2, dan Ende pada peringkat 3.

Tabel 4.3
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di
Nusa Tenggara Timur, 2012-2017

No	Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
			Jumlah	Presentase
1	2012	222,507	998,45	20,41
2	2013	251,080	1006,88	20,24
3	2014	312,328	991,88	19,60
4	2015	307,224	1160,53	22,58
5	2016	327,003	1150,08	22,01
6	2017	346,737	1134,74	21,38

Sumber Data: BPS Nusa Tenggara Timur, diolah 2018

Tabel 4.4
Garis Kemiskinan, jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2017

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin	
			Jumlah	Presentasi
1	Sumba Barat Daya	315,066	36,69	29,28
2	Sumba Timur	320,199	78,18	31,03
3	Kupang	325,677	84,35	22,91
4	Timor Tengah Selatan	293,617	136,45	29,44
5	Timor Tengah Utara	335,517	58,60	23,52
6	Belu	319,280	33,95	15,95
7	Alor	287,878	43,90	21,67
8	Lembata	355,693	36,26	26,68
9	Flores Timur	267,317	26,97	10,75
10	Sikka	288,332	45,21	14,20
11	Ende	341,219	65,11	23,95
12	Ngada	315,778	20,21	12,77
13	Manggarai	306,419	71,86	21,91
14	Rote Ndao	306,419	45,57	28,81
15	Manggarai Barat	304,277	49,39	18,86
16	Sumba Tengah	271,365	35,37	36,01
17	Sumba Barat Daya	338,742	99,55	30,13
18	Nagekeo	316,717	19,21	13,48
19	Manggarai Timur	299,530	74,85	26,80
20	Sabu Raijua	354,983	28,22	31,07
21	Malaka	321,052	30,21	16,52
22	Kota Kupang	504,179	40,22	9,81
	Nusa Tenggara Timur	343,396	1,150,79	21,85

Sumber : BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur diolah 2018

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: Umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak.

Tabel 4.5
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Nusa Tenggara Timur, 2017

No	Kabupaten/Kota	Umur Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lamanya Sekolah	Pengeluaran Rill Perkapita disesuaikan	IPM
1	Sumba Barat	66,20	12,87	6,51	6,997	62,30
2	Sumba Timur	64,12	12,79	6,73	9,093	64,19
3	Kupang	63,49	13,49	7,10	7,031	62,79
4	Timor Tengah Selatan	65,65	12,54	6,39	6,676	61,08
5	Timor Tengah Utara	66,19	13,28	7,14	6,164	62,03
6	Belu	63,42	12,24	7,07	7,251	61,44
7	Alor	60,47	12,08	7,77	6,553	59,61
8	Lembata	66,19	12,25	7,58	7,084	63,69
9	Flores Timur	64,45	12,88	7,12	7,442	62,89
10	Sikka	66,30	12,34	6,56	7,855	63,08
11	Ende	64,48	13,75	7,63	8,841	66,11
12	Ngada	67,36	12,67	7,85	8,649	66,47
13	Manggarai	65,48	12,32	6,98	7,056	62,24
14	Rote Ndao	63,41	12,91	6,98	6,320	60,51
15	Manggarai Barat	66,19	11,09	7,14	7,269	61,65
16	Sumba Tengah	67,74	12,31	5,51	5,946	59,39
17	Sumba Barat Daya	67,76	13,03	6,31	6,134	61,46
18	Nagekeo	66,36	12,45	7,52	8,199	64,74
19	Manggarai Timur	67,40	11,04	6,45	5,643	58,51
20	Sabu Raijua	59,00	13,11	6,02	5,120	55,22
21	Malaka	64,29	12,75	6,32	5,726	58,90
22	Kota Kupang	68,58	15,77	11,45	13,028	78,25
	Nusa Tenggara Timur	66,07	13,07	7,15	7,350	63,73

Sumber data: BPS Kota Kupang, diolah 2018

Tabel 4.6
Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
menurut jenjang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2017

No	Jenjang Pendidikan	APM	APK
1	SD/MI	95,4	114,05
2	SMP/MTS	67,16	91,35
3	SMS/SMK/MA	53,32	78,83

Sumber data: BPS Kota Kupang, diolah 2018

Angka partisipasi murni NTT jenjang SD sederajat tahun 2017 adalah 95,40, untuk jenjang SMP sederajat adalah 67,16, dan jenjang SMA sederajat adalah 53,32. Angka ini mengikuti trend yang positif dimana setiap tahunnya persentase sekolah anak NTT meningkat. Berdasarkan Susenas 2017, penduduk NTT usia 10 tahun keatas yang tidak memiliki ijazah (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) di NTT mencapai angka 32,91% dengan angka buta huruf mencapai 7,25%. Data ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yang mengindikasikan peningkatan pendidikan di NTT.

4.2 Profil Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang di tindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti dengan menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU 16 Tahun 1997 antara lain:

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri dari statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya serta mandiri atau bersama dengan BPS.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistik nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.

4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

4.3 Sejarah Berdirinya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

1) Masa Hindia Belanda

Didirikan tahun 1920 dengan tugas mengumpulkan data statistik Bea dan Cukai, dan bernaung di bawah Departemen *Lanbout Nijverheid en Handel*. Tanggal 24 September 1924 pusat kegiatan pindah dari Bogor ke Jakarta dengan nama *Central Kantoer Voord Statistiek (CKS)*.

2) Masa Pemerintahan Jepang

Tahun 1942-1945, CKS beralih ke Pemerintahan Militer Jepang kegiatannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan data yang berkaitan dengan Pemerintahan militer Jepang. Bernaung di bawah Gubernur Militer (Gunseikanbu) dengan nama “CHOSASITU GUNSEIKANBU”.

3) Masa Pemerintahan RI 1945-1965

Sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 Chosasitsu Guenseikanbu diubah menjadi Kantor Penyelidikan Perangkat Umum (KAPPURI), yang dipimpin oleh Mr.Abdul Karim Pringgodigdo. Pada awal 1946 KAPPURI pindah ke Yogyakarta mengikuti pindahnya Pusat Pemerintahan RI ke Yogyakarta. Saat itu KAPPURI dipimpin oleh SEMAUN. Sementara itu di Jakarta Pemerintah Federal (BELANDA) menghidupkan CKS. Berdasarkan surat edaran Kementrian Kemakmuran 12 Juni 1950 No.219/SC, kedua kantor

tersebut dilebur menjadi satu dengan nama “Kantor Pusat Statistik” dibawah kementerian Kemakmuran.

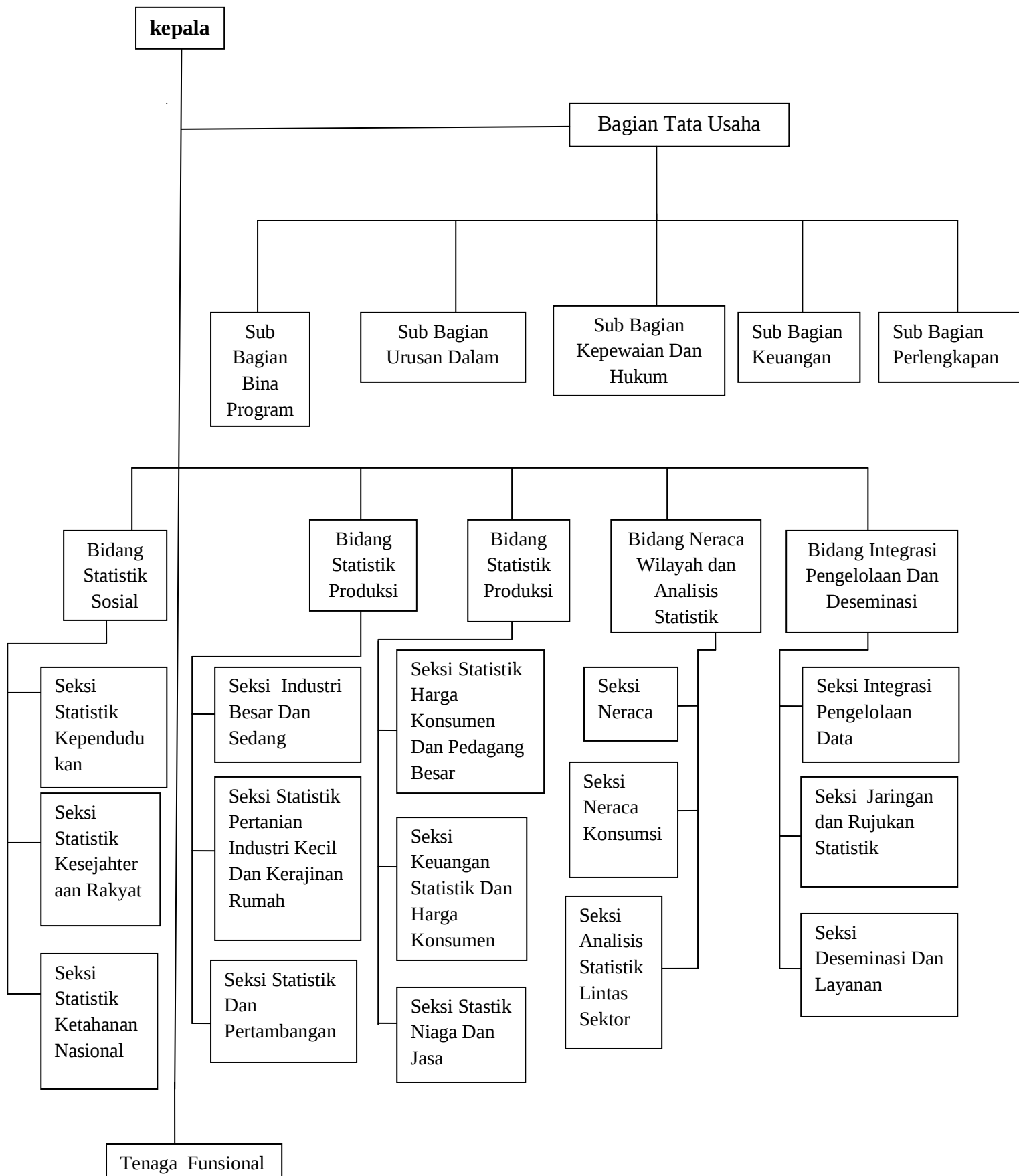
Berdasarkan surat keputusan Presiden RI No 172/195, KPS diubah menjadi “Biro Pusat Statistik” (BPS), dan langsung berada di bawah Perdana Menteri. Pada tanggal 24 September 1960 dengan Undang-Undang No.7/1960 di tetapkan bahwa “ Badan Pusat Statistik” (BPS), ditugas sebagai penyelenggara Sensus (Pasal 2 UU No.7 tahun 1960).

Tahun 1961, untuk yang pertama kalinya BPS menyelenggarakan Sensus Penduduk sejak masa kemerdekaan RI. Di tiap-tiap kator Gubernur (Provinsi), Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan dibentuk bagian yang mengurus pelaksanaan Sensus Penduduk. Tahun 1965, dengan Keputusan Presidisiium Kabinet No.Aa/C/9 bagian sensus di tiap kantor Gubernur dan Kabupaten/Kotamadya tersebut ditetapkan menjadi Kantor Sensus dan Statistik.

4) Masa Pemerintahan RI 1966-Sekarang

Tahun 1968, ditetapkan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1968, yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja BPS (di pusat dan daerah). Tahun 1980 ditetapkan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1980, tentang organisasi BPS ebagai penggangti PP No.16/1968. Berdasarkan PP No.6/1980 di setiap provinsi terhadap kantir statistik dengan nama Kantor Statistik Provinsi dan begitu juga setiap Kabupaten dan Kotamadya terhadap Kantor Statistik dengan nama Kantor Statistik Kabupaten/Kota.

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi
Nusa Tenggara Timur**



4.4 Visi, Misi dan Nilai-Nilai Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.4.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

Adapun Visi Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur ialah sebagai berikut: “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”.

Adapun Misi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional.
2. Memperkuat sistem statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik.
3. Membangun instan Statistik yang profesional, berintegrasi dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

4.4.2 Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nilai-nilai inti BPS terdiri dari:

- a. Profesional
 - 1) Komponen: mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban
 - 2) Efektif: Memberikan hasil maksimal
 - 3) Efisien: mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal.
 - 4) Inovatif: Selalu melakukan pembaharuan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus.
 - 5) Sistematis: Menediakan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang satu dengan yang lain

b. Integras

1. Dedikasi: Memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi
2. Disiplin: Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Konsisten: Satunya kata dengan perbuatan.
4. Terbuka: Menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak
5. Akuntabel: Bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

c. Amanah

- 1) Terpercaya: Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spritual.
- 2) Jujur: Melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpan dari prinsip moralitas.
- 3) Tulus: Melaksanakan tugas konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Adil: Menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

4.4.3 Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pusat Statistik.

Adapun tugas dari Badan Pusat Statistik adalah untuk melaksanakan tugas pemerintah dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi BPS Provinsi:

1. Pengajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang kegiatan statistik.
2. Pengkoordinasi kegiatan statistik nasional dengan regional
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar
4. Penetapan sistem statistik nasional
5. Pembinaan dan fasilitas terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik, dan
6. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang, perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Kewenangan BPS Provinsi NTT:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang;
2. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Perumusan kebijakan di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kegiatan statistik
- b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral

4.5 Kegiatan Badan Pusat Statistik

1. Pengolahan data

Tahapan pengolahan data sangat menentukan seberapa jauh tingkat keakuratan dan ketetapan data statistik yang dihasilkan. BPS merupakan instansi perintis dalam penggunaan komputer karena telah memulai menggunakannya sejak sekitar 1960. Sebelum menggunakan kalkulator dan alat hitung supaya sipoa dalam menolah data.

Teknologi komputer yang diterapkan di BPS selalu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan juga mengacu kepada kebutuhan. Personal komputer yang secara umum lebih mudah dan telah dicoba digunakan untuk menggantikan mainframe. Sejak 1980an, personal komputer telah digunakan diseluruh kantor BPS Provinsi, diikuti dengan penggunaan komputer diseluruh BPS Kabupaten dan Kota sejak 1992.

Dengan menggunakan data personal komputer, kantor statistik didaerah dapat segera memproses pengolahan data, yang merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan data, kemudian memasukkan data mentah kedalam komputer dan selanjutnya data tersebut dikirim ke BPS pusat untuk diolah menjadi data nasional.

Pengolahan data menggunakan personal komputer telah lama menjadi contoh pengolahan yang ditetapkan oleh direktorat teknis di BPS pusat, terutama jika direktorat tersebut harus mempunyai sumber aplikasikan hasil yang diperoleh dari survei yang diselenggarakan.

Pengolahan data sensus penduduk 2000 telah menggunakan mesin scanner, tujuannya untuk mempercepat kegiatan pengolahan data. Efektif positif dari penggunaan komputer oleh direktorat teknis yaitu selain lebih cepat, juga dapat memotivasi pegawai yang terlibat turun bertanggung jawab untuk menghasilkan sebanyak mungkin data statistik dan indikator secara tepat waktu dan akurat dibanding sebelumnya. Selain itu, pengguna komputer sangat mendukung BPS dalam menghasilkan berbagai data statistik dan indikator-indikator yang rumit seperti kemiskinan, Input-Output (I-O) table, Sosial Accounting Matrix (SAM), dan berbagai macam indeks komposit dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam mengolah data, BPS juga telah mengembangkan berbagai program aplikasi untuk data entri, editing, validasi, tabulasi dan analisis dengan menggunakan berbagai macam bahasa dan paket komputer. BPS bertanggung jawab untuk mengembangkan berbagai perangkat lunak komputer serta mentransfer pengetahuan dan keahliannya kepada staf BPS daerah.

Penggunaan infrastruktur teknologi informasi di BPS didasarkan pada tujuan yang diinginkan dicapai yaitu mengikuti perkembangan permintaan dan kebutuhan dalam pengolahan data statistik, melakukan pembaharuan/inovasi

dalam hal metode kerja yang lebih baik serta memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi statistik.

1. Analisis Data

Analisis terhadap data yang dihasilkan dari sensus dan survei BPS, dilaksanakan oleh Biro Analisis dan Pengembangan. Untuk menghasilkan analisis data yang optimal, BPS juga bekerjasama dengan para pakar dari perguruan tinggi di Indonesia dan badan-badan Internaional.

Kajian dan analisis data statistik diarahkan untuk dapat memahami dan memberikan perkiraan kuantitatif proyeksi berbagai bidang penting dari pembangunan nasional, untuk keperluan perencanaan, penyusunan kebijaksanaan dan pemantauan. Hasil-hasil analisis tersebut antara lain: Analisis Statistik Industri Besar/Sedang, Analisis Pertambangan dan Gas Bumi, Analisis Statistik Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya, Analisis Usaha Perusahaan Perikanan Lautan dan Tambak, Analisis Kependudukan, Analisis Fertilitas dan sebagainya.

BPS telah menetapkan status desa miskin berdasarkan PRODES 1990. Dari variabel yang ada diambil beberapa yang berhubungan dengan kemiskinan. Ada tiga kelompok variabel yang digunakan, yaitu: potensi variabel fasilitas desa, fasilitas perumahan dan lingkungan dan variabel keadaan penduduk. Setiap variabel ditentukan nilai skornya berdasarkan tiga kategori, kaya, sedang dan miskin. Kemudian dijumlahkan dan didapatkan total skor setiap desa. Total skor tersebut digunakan untuk menentukan status tiap desa.